



BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN WILAYAH PAPUA II  
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

# LAKIP

## Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN  
WILAYAH PAPUA II



Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat-Nya sehingga penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II Tahun Anggaran 2021 dilakukan dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Unit kerja BP2P Papua II menyusun LAKIP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan secara berjenjang akan diintegrasikan kepada LAKIP Unit Kerja di atasnya sampai dengan Eselon I dengan muatan sesuai Renstra masing-masing serta selanjutnya diintegrasikan ke LAKIP Kementerian mengacu kepada Renstra Kementerian PUPR dan Realisasi Penetapan Kinerja.

LAKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II ini diharapkan menjadi alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Kementerian PUPR.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dapat bekerja sama dan dukungan seluruh jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya terselesaikannya laporan kinerja ini.

Manokwari, Januari 2022

  
KEPALA BALAI  
**Ir. YANCE PABISA, M.Tech**  
NIP. 19650412 199703 1 009

Provinsi Papua Barat berada di bawah naungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II yang memiliki wilayah administratif di 13 kabupaten/kota. LAKIP ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagaimana yang direvisi pada bulan Desember 2021 dan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Provinsi Papua tahun 2021. Dalam Rangka pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II didukung dengan struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Balai; Kasubag TU; Kepala Seksi Wilayah I dan Kepala Seksi Wilayah II; Kepala Satuan Kerja; Pejabat Pembuat Komitmen; Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran; Bendahara Pengeluaran, Kaur Teknik, Kaur Data & Administrasi dan Unit Uakpa & Uakbn.

Struktur diatas isi dengan SDM di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan yang berjumlah 41 orang dengan rincian:

- a. PNS 14 Orang
- c. Non PNS 17 Orang
- d. Konsultan Individu/ Tenaga Ahli 10 Orang

Wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II meliputi 13 Kab./Kota (12 Kabupaten dan 1 Kota) se Provinsi Papua Barat. Wilayah tersebut antara lain Kab. Manokwari (sebagai ibukota provinsi), Kota Sorong, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Maybrat, Kab. Tambrauw, Kab. Manokwari Selatan dan Kab. Pegunungan Arfak.

Secara umum, capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II mendapat alokasi anggaran sesuai DIPA terakhir sebesar Rp. 4.110.990.000,-. Adapun realisasi keuangan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.977.421.000,- dengan persentase realisasi keuangan sebesar 96,75%, realisasi fisik mencapai 100%. Sedangkan capaian kinerja Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat mendapat alokasi anggaran sesuai DIPA terakhir sebesar Rp.

198.937.981.000,-. Adapun realisasi keuangan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 171.609.039,- dengan persentase realisasi Keuangan sebesar 86.26%, sedangkan realisasi fisik mencapai 86.18%.

Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan Tahun Anggaran 2021 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Visi yang tertuang dalam laporan akhir kinerja pemerintah. Dalam menjalankan misi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan sebanyak 4 dokumen
2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah 2.520 unit
3. Jumlah Bantuan Pengembangan Sarana Hunian Pendukung KSPN sebanyak 90 unit
4. Jumlah Rumah Susun dibangun 152 unit
5. Jumlah Rumah Khusus dibangun 82 unit
6. Jumlah rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU sebanyak 50 unit

Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II

NO	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi	Kinerja
						(Rp Ribu)	
<b>1</b>	<b>IA</b>	<b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>				<b>1.542.958</b>	<b>100</b>
1	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni				1.542.958	100
1	ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.195.401	100
2	FAD		Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan	1 Layanan	123.286	100
3	FBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	13 Daerah (Prov/Kab/Kota)	13 Daerah (Prov/Kab/Kota)	224.270	100
<b>2</b>	<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>				<b>2.434.463</b>	<b>100</b>
2	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan				2.434.463	100
4	EAA		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1.635.620	100
5	EAC		Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	699.618	100

**LAPORAN KINERJA TA. 2021**  
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN WILAYAH PAPUA II

6	EAD		Layanan Sarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	99.225	100
<b>TOTAL</b>						<b>3.977.421</b>	

Capaian Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua Barat

NO	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi	Kinerja
						(Rp Ribu)	
1	IA	<b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>				196.971.740	86,04
1	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni				196.971.740	86,04
1	ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	394.441	100
2	CBB		Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	64 Unit	64 Unit	19.455.766	100
3	FAD		Perencanaan dan Penganggaran	4 Layanan	4 Layanan	248.413	100
4	FAG		Pengawasan Pembangunan	7 Laporan	7 Laporan	11.665.586	89,22
5	RBB		Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	2.830,01	2.830,01	165.207.534	84,12
2	WA	<b>Program Dukungan Manajemen</b>				<b>2.434.463</b>	<b>100</b>
2	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan				2.434.463	100
4	EAA		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1.561.621	100
5	EAC		Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	304.620	100
6	EAD		Layanan Sarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100.000	100
<b>TOTAL</b>						<b>198.937.981</b>	



<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi

## **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI .....	2
1.3 STRUKTUR SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI PAPUA BARAT.....	4
1.4 ISU STRATEGIS.....	5

## **BAB II RENCANA KINERJA**

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS.....	7
2.2 PERJANJIAN KINERJA.....	8
2.3 METODE PENGUKURAN.....	10
2.4 TARGET TAHUN INI MENURUT RENSTRA.....	10

## **BAB III KAPASITAS ORGANISASI**

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA.....	12
3.2 SARANA DAN PRASARANA.....	16
3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN.....	17

## **BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA**

4.1 REALISASI ANGGARAN.....	20
4.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	22
4.3 PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI.....	24
4.4 ANALISIS KINERJA ORGANISASI.....	25

## **BAB V PENUTUP**

5.1 PERMASALAHAN.....	26
5.2 LANGKAH KE DEPAN.....	27

## **LAMPIRAN**

## Daftar Tabel

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II.....	9
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Tahun 2021 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II.....	10
Tabel 3.1.a. Total Sumber Daya Manusia di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua Barat.....	12
Tabel 3.1.b Daftar Pegawai Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua Barat.....	13
Tabel 3.1.c. Daftar Tenaga Ahli Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II.....	15
Tabel 3.2.a. Sarana dan Prasarana Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II TA 2021.....	16
Tabel 3.2.b. Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua Barat TA 2021.....	16
Tabel 3.3.a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Akhir BP2P Papua II TA 2021.....	17
Tabel 3.3.b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Akhir Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua Barat 2021.....	19
Tabel 4.1.a. Realisasi Anggaran Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2021.....	20
Tabel 4.1.b. Realisasi Anggaran Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2021.....	21
Tabel 4.2.a Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II TA 2021.....	23
Tabel 4.2.b. Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II TA 2021.....	23
Tabel 4.3 Perbandingan Capaian Kinerja setiap Tahun Anggaran terhadap Renstra 2020-2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II.....	24

## Daftar Gambar

Gambar 1.2.a. Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II.....	4
Gambar 1.2.b. Struktur Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua Barat.....	4
Gambar 1.2.c. Struktur BP2P Papua II dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua Barat serta garis koordinasinya. ....	5
Gambar 3.1.a. Persentase SDM Balai Pelaksana Perumahan Wilayah Papua II Berdasarkan Status Pegawai	12
Gambar 3.1.b. Persentase SDM Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Papua II Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	13
Gambar 4.1.a Kurva S Keuangan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II TA 2021.....	21
Gambar 4.1.b Kurva S Keuangan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua Barat TA 2021.....	22



## 1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II berdasarkan dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 2020 – 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II Tahun 2021 antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Permen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan mengenai visi dan misi Kementerian PUPR, Capaian Kinerja tahun ini, Capaian Kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan programnya.

Pada akhir tahun 2021 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.110.990.000,- untuk membantu Direktorat Penyediaan Perumahan mewujudkan **“Peningkatan Akses Masyarakat Melalui Penyediaan Rumah Layak Huni Secara**

**Kolaboratif**'. Hal tersebut didukung dengan adanya program Program Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan.

## **1.2.TUGAS DAN FUNGSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Nomor: 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada bagian keempat. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II mempunyai garis koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam hal ini Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan sebagai atasan dan para Direktur di Ditjen Penyediaan Perumahan sebagai atasan langsung.

### **1.2.1. Tugas**

Tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020 – 2025. Tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II secara umum antara lain;

1. Menyelenggarakan Program Perumahan dan Kawasan Perumahan dengan menyediakan Akses Rumah Layak Huni yang bertujuan untuk Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni
2. Menyelenggarakan Program Dukungan Manajemen Perumahan yang bertujuan untuk Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan.

### **1.2.2. Fungsi**

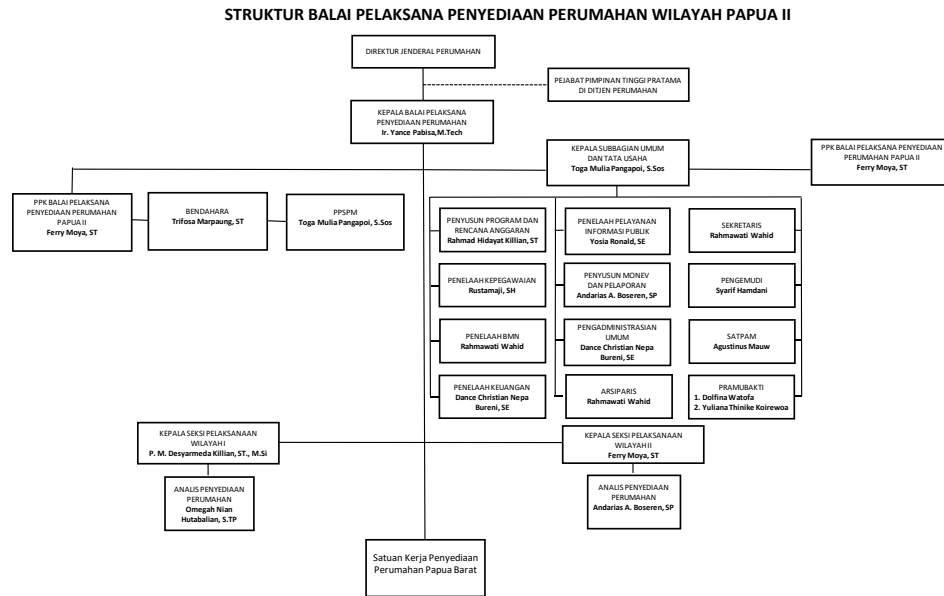
Dalam melaksanakan tugas, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
2. Penyusunan rencana teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
3. Pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;

5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
6. Pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
7. Koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana;
8. koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset; dan
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

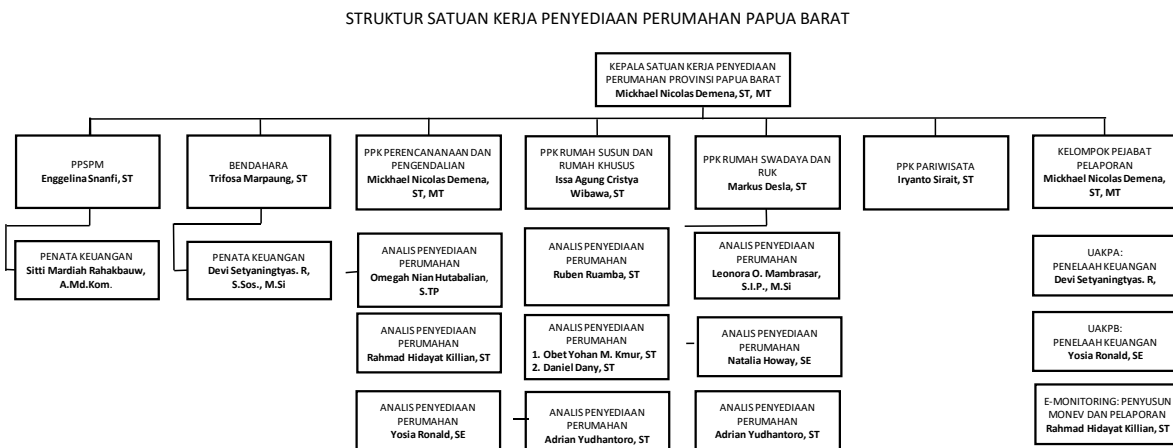
## 1.2. STRUKTUR BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

Sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II maka diperlukan perumusan struktur organisasi yang dapat dilihat pada gambar berikut:

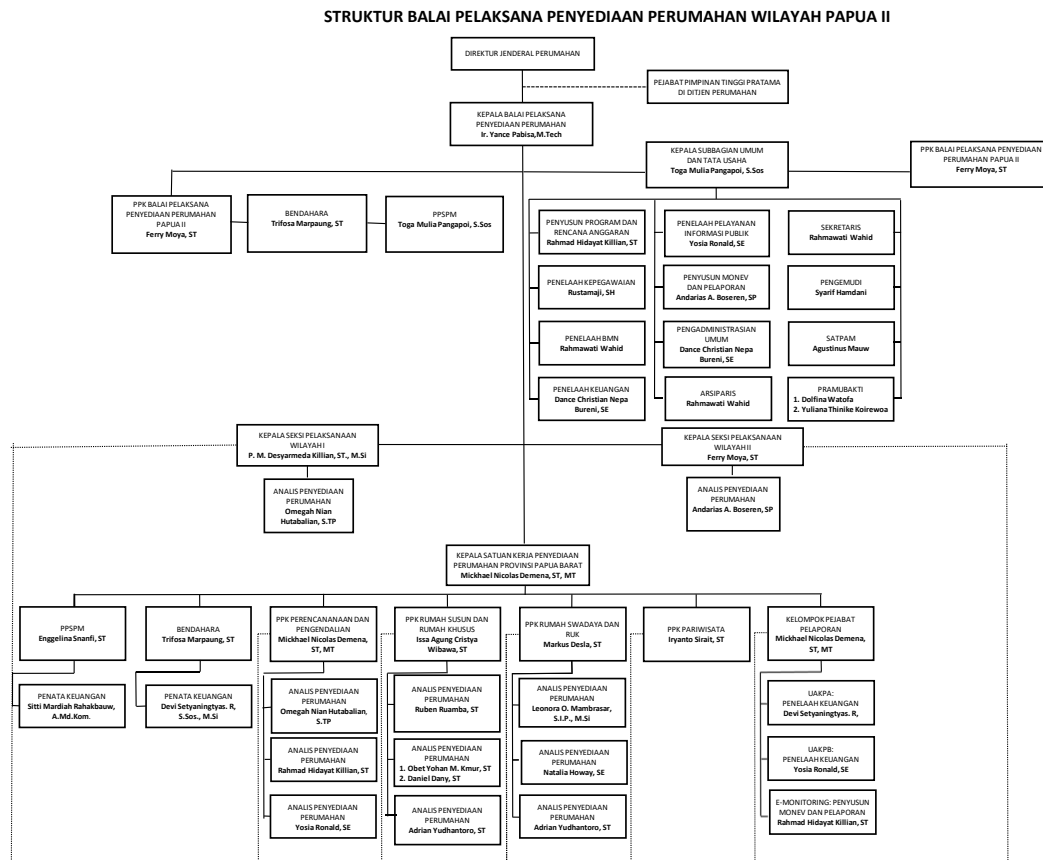


**Gambar 1.2.a. Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II**

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II memiliki wilayah kerja yakni Provinsi Papua Barat dimana dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dibantu oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua II Adapun perumusan struktur organisasi yang dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 1.2.b. Struktur Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua Barat**



**Gambar 1.2.c. Struktur BP2P Papua II dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua Barat serta garis koordinasinya.**

### 1.3. ISU STRATEGIS

Wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II adalah pada wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 13 Kab./Kota (12 Kabupaten dan 1 Kota). Wilayah kab./kota tersebut adalah Kab. Manokwari (sebagai ibukota provinsi), Kota Sorong, Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Raja Ampat, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak, Kab. Teluk Wondama, Kab. Maybrat, Kab. Tambrau, Kab. Manokwari Selatan dan Kab. Pegunungan Arfak.

Isu strategis yang dihadapi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama, data dan informasi serta evaluasi kinerja penyediaan perumahan Provinsi Papua Barat;

2. Tingginya angka backlog di Indonesia berdasarkan konsep kepemilikan, backlog perumahan pada tahun 2014 sebesar 13,5 juta unit (Sumber : BPS dan Bappenas). Berdasarkan konsep penghunian, backlog Perumahan sebesar 7,6 juta unit (Sumber:Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019).
3. Tingginya Jumlah keluarga yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Kawasan Kumuh pada masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan daerah pulau terluar, terpencil dan tertinggal dan atau kawasan cagar budaya.
4. Ketersediaan lahan baik itu perkotaan maupun di daerah yang didominasi oleh Hak Ulayat (Hak Adat);
5. Basis Data Perumahan di Provinsi Papua Barat yang kurang memadai;
6. Kurangnya kepedulian Pemerintah Daerah dalam menyusun RP3KP;
7. Serat Terima Aset yang belum Optimal;
8. Alokasi dana yang diberikan sangat minim tidak sebanding dengan unit organisasi yang lain, sementara usulan usulan dari kab/kota sangat banyak.

### 2.1. URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, perencanaan strategis yang disusun oleh Kementerian atau Lembaga selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Turunan dari rencana strategis dan infrastruktur dasar dan hunian yang layak dalam rangka rencana kinerja adalah penetapan kinerja yang merefleksikan kinerja yang sesuai dengan perencanaan anggaran. Pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II merupakan aksi nyata dari berbagai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung program/kegiatan Kabinet Kerja. Berbagai perencanaan yang telah ditetapkan dalam sebuah dokumen, disusun sedemikian rupa sehingga memiliki hubungan vertikal yang mencerminkan gambaran pelaksanaan kegiatan Unit Organisasi yang melaksanakannya.

Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR adalah Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif. Guna mendukung kebijakan tersebut, disusun 3 (tiga) strategi sebagai langkah pendekatan pencapaian target renstra, yaitu:

1. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah;
2. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah;
3. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif.

Target kinerja yang hendak dicapai oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II selama kurun waktu 5 tahun, mulai tahun 2020 hingga tahun 2024, yaitu berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui:

1. Pembangunan Rumah Susun 1.064 unit,
2. Pembangunan Rumah Khusus 1.085 unit;
3. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 22.710 unit;
4. Bantuan KSPN 590 unit
5. Bantuan PSU Rumah Umum 1.800 unit

Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan rumah baru layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai serta meningkatnya kepastian hukum dalam bermukim serta peningkatan kualitas perumahan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan pembangunan perumahan dapat berjalan secara optimal sehingga pada akhirnya pemenuhan hunian yang layak sebagai hak dasar rakyat dapat lebih terjamin guna mewujudkan masyarakat yang lebih berjati diri, mandiri dan produktif.

## **2.2. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen yang dinyatakan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan untuk satu tahun anggaran dalam suatu pernyataan tertulis demi melaksanakan amanat yang terdapat pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Adapun tujuan umum penetapan kinerja adalah (i) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (ii) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (iii) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (iv) sebagai dasar pemberian penghargaan dan atau sanksi (*reward and punishment*).



**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			AWAL	REVISI
<i>Program Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman</i>				
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	4 Laporan	4 Laporan
		2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	2.140 Unit	2.520 Unit
		3. Jumlah Bantuan Pengembangan Sarana Hunian Pendukung KSPN	140 Unit	90 Unit
		4. Jumlah Rumah Susun yang dibangun	196 Unit	152 Unit
		5. Jumlah Rumah khusus yang dibangun	61 Unit	82 Unit
		6. Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	300 Unit	50 Unit
<i>Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan</i>				
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2 Layanan	2 Layanan
		2. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	2 Layanan	2 Layanan
		3. Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan	2 Layanan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II yang telah disepakati sesuai dengan pagu anggaran awal (per 23 November 2020) yang di alokasikan dalam rangka menunjang kegiatan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 4.600.000.000,- dan pada Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua Barat sebesar Rp. 199.045.004.000,-. Namun sejalan dengan dinamika perubahan anggaran, maka pagu ini mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali pada DIPA Balai dan 9 (sembilan) kali pada DIPA Satuan Kerja, beberapa kali perubahan terdapat pada target pelaksanaan program penyediaan perumahan antara lain: kegiatan Pemberdayaan Perumahan Swadaya dan KSPN, kegiatan Penyediaan Rumah Khusus dan kegiatan Penyediaan Rumah Susun; kegiatan fasilitasi PSU bagi rumah MBR; serta penanganan Pandemi Covid-19. Sehingga pagu anggaran akhir (per 3 Desember 2021) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II adalah sebesar Rp. 4.110.990.000,- dan (per 14 Desember Oktober 2021) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua Barat Tahun 2021 adalah sebesar Rp.198.937.981.000,-.

### 2.3. METODE PENGUKURAN

Metode pengukuran Kegiatan merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran program yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Pengukuran dilakukan dengan memfokuskan indikator kinerja yang dimiliki oleh Unit Kerja Direktorat Jenderal Perumahan dalam hal ini Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II seperti: Program Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman dan Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Indikator Kinerja Balai Papua II periode tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Indikator Kinerja Tahun 2021 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II**

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Program Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan</li><li>2. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Rumah Swadaya/KSPN</li><li>3. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Rumah Susun</li><li>4. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Rumah Khusus</li><li>5. Jumlah Rumah MBR yang mendapatkan bantuan PSU</li></ol>
Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal</li><li>2. Jumlah Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Satker</li><li>3. Jumlah Pemenuhan Layanan Perkantoran</li></ol>

**Sumber:** Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

### 2.4. TARGET TAHUN INI MENURUT RENSTRA

Renstra RPJMN 2020 - 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II dibuat berdasarkan kondisi nyata di daerah yang sangat membutuhkan rumah layak huni dan meningkatkan taraf hidup yang layak dengan mempertimbangkan kearifan lokal daerah setempat berlandaskan visi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Target Pembangunan Perumahan Tahun 2021 Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II antara lain:

1. Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan sebanyak 4 (empat) dokumen;

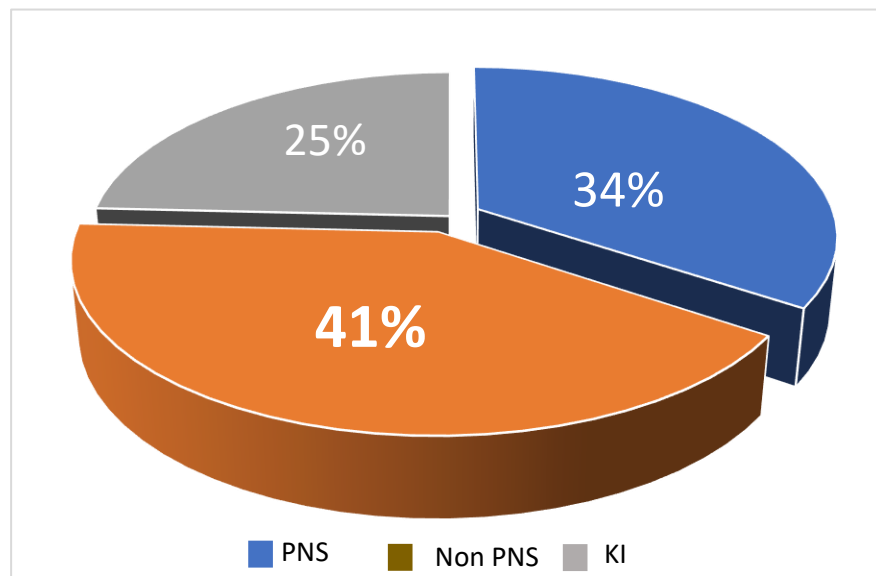
2. Pemberdayaan Rumah Swadaya sebanyak 3.000 unit;
3. Pemberdayaan Bantuan Sarana Hunian Pendukung KSPN sebanyak 140 Unit;
4. Penyediaan Rumah Khusus sebanyak 111 unit;
5. Penyediaan Rumah Susun sebanyak 182 unit.
6. Penyediaan PSU Bagi rumah MBR sebanyak 300 unit.

**3.1. SUMBER DAYA MANUSIA**

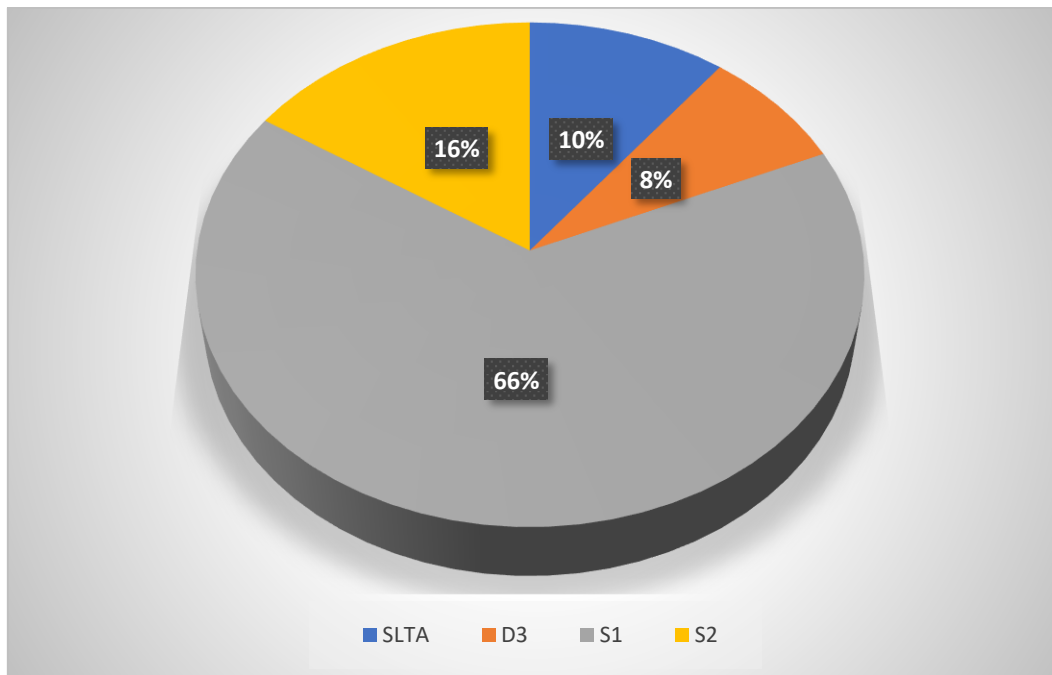
Adapun komposisi SDM Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II berjumlah 41 orang dengan jenis kelamin Perempuan berjumlah 10 orang dan laki-laki berjumlah 31 orang. Untuk jenjang pendidikan SDM Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.a. Total Sumber Daya Manusia di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua Barat**

Status Pegawai	Jenjang Pendidikan				TOTAL
	SLTA	D3	S1	S2	
PNS	-		10	4	14
NON PNS	4	2	9	2	17
KI			10		10
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>29</b>	<b>5</b>	<b>41</b>



**Gambar 3.1.a. Persentase SDM Balai Pelaksana Perumahan Wilayah Papua II Berdasarkan Status Pegawai**



**Gambar 3.1.b. Persentase SDM Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Papua II Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

**Tabel 3.1.b Daftar Pegawai Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua Barat**

NO	NAMA	NIP/NRP	JABATAN	STATUS PEGAWAI	PENDIDIKAN
1	Ir.Yance Pabisa, M.Tech	196912181996031005	Kepala Balai	PNS Pusat	Teknik
2	Toga Mulia Pangapoi, SE	197309192008121001	KTU	PNS Pusat	Non Teknik
3	P. M. Desyarmada Killian, ST., M.Si	19791227 200605 2 001	Kepala Seksi Wilayah I	PNS Pusat	Teknik
4	Ferry Moya, ST	19821029 201412 1 001	Kepala Seksi Wilayah II / PPK BP2P Papua II	PNS Pusat	Teknik
5	Ahmad R. Abbas, ST	19800405 201004 1 001	Staf Pengelola BP2P Papua II	PNS Pusat	Teknik
6	Mickhael Nicolas Demena, ST., MT	19800813 200312 1 004	Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua Barat	PNS Pusat	Teknik

**LAPORAN KINERJA TA. 2021**  
**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN WILAYAH PAPUA II**

7	Issa Agung Cristya Wibawa, ST	19821012 201412 1 001	Staf Pengelola	PNS Pusat	Teknik
8	Markus Desla, S.Kom	19871231 201412 1 001	Staf Pengelola	PNS Pusat	Non Teknik
9	Iryanto Sirait, ST, M.Si	19800130 200605 1 001	PPK Rumah Swadaya	PNS Pusat	Teknik
10	Enggelina Snanfi, ST	19821020 201412 2 001	PPSPM	PNS Daerah	Teknik
11	Trifosa Marpaung, ST	19871030 201412 1 001	Bendahara Pengeluaran	PNS Daerah	Teknik
12	Amus Yanto Ijie, ST	19810108 200801 1 009	Staf Pengelola	PNS Pusat	Teknik
13	Rustamaji, SH	19741208 200412 1 002	Staf Pengelola	PNS Daerah	Non Teknik
14	Yosia Ronald, SE	19891113 201412 1 001	Staf Pengelola	PNS Daerah	Non Teknik
15	Adrian Yudhantoro, ST	F04121993092018001	Pelaksana Teknik	Non PNS	Teknik
16	Andarias A. Boseran, SP	F11081987092018001	Penyusun Monev dan Pelaporan	Non PNS	Non Teknik
17	Dance Christian Nepa Bureni, SE	F28121979092018001	Penelaah Keuangan	Non PNS	Non Teknik
18	Daniel Dany, ST	F10061983092018001	Pelaksana Teknik	Non PNS	Teknik
19	Devi Setyaningtyas. R, S.Sos., M.Si	F12041980092018001	Penelaah BMN	Non PNS	Non Teknik
20	Leonora O. Mambrasar, S.I.P., M.Si	F27121979092018001	Penelaah Pengadaan Barang dan Jasa	Non PNS	Non Teknik
21	Natalia Howay, SE	F24121992092018001	Penelaah Keuangan	Non PNS	Non Teknik
22	Obet Yohan M. Kmur, ST	F18071982092018001	Pelaksana Teknik	Non PNS	Teknik
23	Omegah Nian Hutabalian, S.TP	F22091993092018001	Penelaah Keuangan	Non PNS	Non Teknik
24	Rahmad Hidayat Killian, ST	F19021990092018001	Pelaksana Teknik	Non PNS	Teknik

25	Rahmawati Wahid, A.Md Kep	F10021991092018001	Penata BMN	Non PNS	Non Teknik
26	Ruben Ruamba, ST	F24071978092018001	Pelaksana Teknik	Non PNS	Teknik
27	Sitti Mardiah Rahakbauw, A.Md.Kom	F16101989092018001	Penata Keuangan	Non PNS	Teknik
28	Yuliana Thinike Koirewoa	F12081988092018001	Pramubakti	Non PNS	Non Teknik
29	Dolfina Watofa	F11121966092018001	Pramubakti	Non PNS	Non Teknik
30	Agustinus Mauw	F27081978092018001	Petugas Keamanan	Non PNS	Non Teknik
31	Syarif Hamdani	F31121979092018001	Pengemudi	Non PNS	Non Teknik

**Tabel 3.1.c. Daftar Tenaga Ahli Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II**

NO	NAMA	JABATAN
1	Rino Razali, S.IP	Tenaga Ahli Muda Individual Rumah Swadaya
2	Sutrisno Dalwis Susanto Kurama, ST	Tenaga Ahli Muda Individual Rumah Swadaya
3	Ririn Engie Valista Serimbing, S.Ars	Tenaga Ahli Muda Individual Rumah Swadaya
4	Budiono	Tenaga Ahli Muda Individual Rumah Swadaya
5	Mirdan Umbu, ST	Tenaga Ahli Muda Individual Rumah Swadaya
6	Ray Damai Samuel Siregar, ST	Tenaga Ahli Bidang Konstruksi
7	Bert Erwin Sembor, ST	Tenaga Ahli Perencanaan Perumahan
8	Zainudin MZ. Zainal, S.Kom	Tenaga Ahli Sinkronisasi Program
9	Sugiarto Massolo, ST	Tenaga Ahli Fasilitasi Pokja PKP untuk Pendataan
10	Muh. Fachrul Bachmid, ST	Konsultan Individu Sinkronisasi Program

### 3.2. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas pendukung untuk meningkatkan kinerja pegawai dan untuk menciptakan pelaksanaan kegiatan perlu ditunjang fasilitas yang memadai sebagai bagian dari proses meningkatkan kinerja atau mengerjakan seluruh kegiatan dengan tepat. Berikut daftar sarana dan prasarana di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua Barat sesuai dengan yang tercatat pada Laporan BMN Tahun 2021:

**Tabel 3.2.a. Sarana dan Prasarana Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II TA 2021**

NO	KODE BARANG	URAIAN	KUANTITAS	SATUAN	NILAI (Rp)
1	A02211 3100102002	Laptop	2	Buah	40.700.000
2	A02212 3100102002	PC Unit	1	Buah	8.800.000
3	A02213 3050201003	Kursi Besi/Metal	7	Buah	9.800.000
4	A02214 3050201002	Meja Kerja Kayu	7	Buah	5.460.000
5	A02215 3050201008	Meja Rapat	1	Buah	6.740.000
6	A02217 3060105047	Kamera Udara	1	Buah	17.889.791
7	A02218 3100102002	Laptop	1	Buah	9.835.248

**Tabel 3.2.b. Sarana dan Prasarana Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua Barat TA 2021**

NO	KODE BARANG	URAIAN	KUANTITAS	SATUAN	NILAI (Rp)
1	A02211 3100102002	Laptop	1	Buah	18.511.000
2	A02212 3100102002	Laptop	1	Buah	17.211.000
3	A02213 3050201003	Laptop	1	Buah	23.721.000
4	A02214 3050201002	Laptop	1	Buah	12.918.050
5	A02215 3050201008	LCD Projector / Infocus	1	Buah	17.179.700
6	A02217 3060105047	Kursi Besi/Metal	8	Buah	9.800.000



Walaupun dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II tidak mengurangi semangat untuk tetap mengerjakan segala aktifitas perkantoran baik didalam kantor maupun diluar kantor sehingga segala tugas yang diembankan tetap dapat dijalankan dengan baik dan lancar.

### 3.3. DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA No. SP DIPA – 033.07.1.420161/2021 dengan alokasi pagu anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II sebesar Rp. 4.600.000.000,-. Selama TA 2021 telah mengalami revisi sebanyak 4 (empat) kali yaitu :  
Revisi 1: karena adanya pengurangan anggaran pada Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen sehingga nilai pagu anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II setelah Revisi ke 01 tanggal 17 Februari 2021 menjadi sebesar Rp. 4.170.685.000,-;

Revisi 2: karena adanya pengurangan anggaran pada Pada Program Dukungan Manajemen sehingga nilai pagu anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II setelah Revisi ke 02 Tanggal 08 Juli 2021 menjadi sebesar Rp. 4.126.927.000,-

Revisi 3: adanya pengurangan anggaran pada Pada Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga nilai pagu anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II setelah Revisi ke-03 Tanggal 30 Agustus 2021 menjadi sebesar Rp. 3.958.990.000,-

Revisi 4: karena adanya penambahan anggaran Pada Program Dukungan Manajemen sehingga nilai pagu anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan setelah Revisi ke-04 Tanggal 28 Oktober 2020 menjadi sebesar Rp. 4.110.990.000,-

**Tabel 3.3.a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Akhir BP2P Papua II TA 2021**

NO	Kode	Program/Kegiatan/Output	Vol	Satuan	Pagu
					(Rp Ribu)
<b>1</b>	<b>IA</b>	<b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>			<b>1.643.605</b>
1	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni			1.643.605
1	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1	Rekomendasi Kebijakan	1.269.352
2	FAD	Perencanaan dan Penganggaran	1	Layanan	142.777
3	FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	13	Daerah (Prov/Kab/Kota)	231.476
<b>2</b>	<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>			<b>2.467.385</b>
2	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan			2.467.385
4	EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1.656.242
5	EAC	Layanan Umum	1	Layanan	711.143

**LAPORAN KINERJA TA. 2021**  
**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN WILAYAH PAPUA II**

---

6	EAD	Layanan Sarana Internal	1	unit	100.000
<b>TOTAL</b>					<b>4.110.990</b>

**Sumber:** Revisi DIPA ke-04 POK II TA 2021 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

Selain itu, sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA No. SP DIPA – 033.07.1.401688/2021 dengan alokasi pagu anggaran Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 199.045.004.000,-. Selama TA 2021 telah mengalami revisi sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu :

Revisi 1: karena adanya Perubahan Nama dari SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat menjadi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat.

Revisi 2: karena adanya Penambahan anggaran untuk Rusun MBR/Pekerja sehingga nilai pagu menjadi anggaran Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat setelah Revisi ke 02 Tanggal 17 Februari 2021 menjadi sebesar Rp. 202.848.039.000,-

Revisi 3: karena adanya Penambahan anggaran PSU Rumah Umum dan Rumah Khusus sehingga nilai pagu menjadi anggaran Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat setelah Revisi ke 03 Tanggal 08 Juli 2021 menjadi sebesar Rp. 224.702.139.000,-

Revisi 4: karena adanya Penambahan anggaran Rumah Khusus dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sehingga nilai pagu menjadi anggaran Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat setelah Revisi ke 04 Tanggal 08 Juli 2021 menjadi sebesar Rp. 249.584.800.000,-

Revisi 5: karena adanya Pengurangan anggaran Rumah Khusus, Rusun MBR/Pekerja dan Rusun Hunian ASN/TNI/POLRI sehingga nilai pagu menjadi anggaran Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat setelah Revisi ke 05 Tanggal 30 Agustus 2021 menjadi sebesar Rp. 220.324.853.000,-

Revisi 6: karena adanya Pengurangan anggaran Rumah Khusus dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sehingga nilai pagu menjadi anggaran Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat setelah Revisi ke 06 Tanggal 22 Oktober 2021 menjadi sebesar Rp. 200.991.536.000,-

Revisi 7: karena adanya Pengurangan anggaran Rumah Khusus (PEN) sehingga nilai pagu menjadi anggaran Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat setelah Revisi ke 07 Tanggal 04 November 2021 menjadi sebesar Rp. 198.937.981.000,-

**Tabel 3.3.b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Akhir Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua Barat 2021**

NO	Kode	Program/Kegiatan/Output	Vol	Satuan	Pagu
					(Rp Ribu)
<b>1</b>	<b>IA</b>	<b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>			<b>196.971.740</b>
1	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni			196.971.740
1	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1	Rekomendasi Kebijakan	394.441
2	CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	64	unit	19.455.766
3	FAD	Perencanaan dan Penganggaran	4	Layanan	248.413
4	FAG	Pengawasan Pembangunan	7	Laporan	11.665.586
5	RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	2830,01	unit	165.207.534
<b>2</b>	<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>			<b>1.966.241</b>
2	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan			1.966.241
6	EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1.561.621
7	EAC	Layanan Umum	1	Layanan	304.620
8	EAD	Layanan Sarana Internal	1	unit	100.000
<b>TOTAL</b>					<b>198.937.981</b>

## 4.1. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2021, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan mendapat alokasi anggaran sesuai DIPA terakhir sebesar Rp. 4.110.990.000,-. Adapun realisasi keuangan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.977.421.000,- dengan persentase realisasi sebesar 96,75%, sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

**Tabel 4.1.a. Realisasi Anggaran Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2021**

NO	Kode	Program/Kegiatan/Output	Vol	Satuan	Pagu	Realisasi	Keuangan		Fisik		Kinerja
					(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN	RL	RN	RL	
1	IA	<b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>			<b>1.643.605</b>	<b>1.542.958</b>	<b>100</b>	<b>93,88</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni			1.643.605	1.542.958	100	93,88	100	100	100
1	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1	Rekomendasi Kebijakan	1.269.352	1.195.401	100	94,17	100	100	100
2	FAD	Perencanaan dan Penganggaran	1	Layanan	142.777	123.286	100	86,35	100	100	100
3	FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	13	Daerah (Prov/Kab/Kota)	231.476	224.270	100	96,89	100	100	100
2	WA	<b>Program Dukungan Manajemen</b>			<b>2.467.385</b>	<b>2.434.463</b>	<b>100</b>	<b>98,67</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan			2.467.385	2.434.463	100	98,67	100	100	100
4	EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1.656.242	1.635.620	100	98,75	100	100	100
5	EAC	Layanan Umum	1	Layanan	711.143	699.618	100	98,38	100	100	100
6	EAD	Layanan Sarana Internal	1	unit	100.000	99.225	100	99,23	100	100	100
<b>TOTAL</b>					<b>4.110.990</b>	<b>3.977.421</b>	<b>100</b>	<b>96,75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

Sumber: e-Monitoring- Status : 7 Januari 2022 ; 08:35 WIB

**LAPORAN KINERJA TA. 2021**  
**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN WILAYAH PAPUA II**



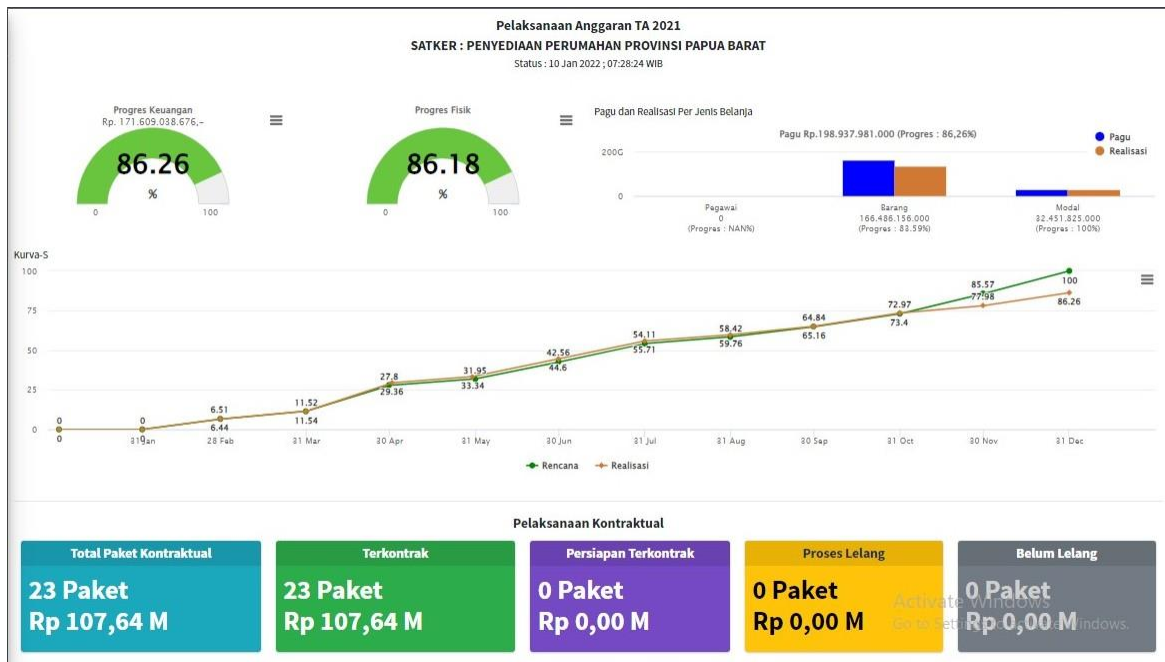
**Gambar 4.1.a Kurva S Keuangan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II TA 2021**

Sedangkan capaian kinerja Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat mendapat alokasi anggaran sesuai DIPA terakhir sebesar Rp. 198.937.981.000,-. Adapun realisasi keuangan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 171.609.039,- dengan persentase realisasi Keuangan sebesar 86.26%, sedangkan realisasi fisik mencapai 86.18%.

**Tabel 4.1.b. Realisasi Anggaran Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2021**

NO	Kode	Program/Kegiatan/Output	Vol	Satuan	Pagu	Realisasi	Keuangan		Fisik		Kinerja
					(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	RN	RL	RN	RL	
<b>1</b>	<b>IA</b>	<b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>			<b>196.971.740</b>	<b>169.648.003</b>	<b>100</b>	<b>86,13</b>	<b>100</b>	<b>86,04</b>	<b>86,04</b>
1	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni			196.971.740	169.648.003	100	86,13	100	86,04	86,04
1	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1	Rekomendasi Kebijakan	394.441	371.408	100	94,16	100	100	100
2	CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	64	unit	19.455.766	18.872.411	100	97,00	100	100	100
3	FAD	Perencanaan dan Penganggaran	4	Layanan	248.413	245.576	100	98,86	100	100	100
4	FAG	Pengawasan Pembangunan	7	Laporan	11.665.586	10.328.120	100	88,53	100	89,22	89,22
5	RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	2830,01	unit	165.207.534	139.830.488	100	84,64	100	84,12	84,12
<b>2</b>	<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>			<b>1.966.241</b>	<b>1.961.036</b>	<b>100</b>	<b>99,74</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
2	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan			1.966.241	1.961.036	100	99,74	100	100	100
6	EAA	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1.561.621	1.557.408	100	99,73	100	100	100
7	EAC	Layanan Umum	1	Layanan	304.620	304.287	100	99,89	100	100	100
8	EAD	Layanan Sarana Internal	1	unit	100.000	99.341	100	99,34	100	100	100
	<b>TOTAL</b>				<b>198.937.981</b>	<b>171.609.039</b>	<b>100</b>	<b>86,26</b>	<b>100</b>	<b>86,18</b>	

Sumber: e-Monitoring- Status : 7 Januari 2022 ; 08:35 WIB



**Gambar 4.1.b Kurva S Keuangan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua Barat TA 2021**

## 4.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja pada yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II memiliki dampak pengaruh langsung terhadap isu strategis dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Papua Barat.

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II serta Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat dalam menghadapi isu strategis dan menurunkan tingginya angka backlog di Provinsi Papua Barat dilandaskan dengan visi Kementerian PUPR diantaranya:

1. Tersusunnya 4 Laporan Perencanaan Penyediaan Perumahan;
2. Terwujudnya 2.520 unit Rumah Swadaya yang tersebar di 13 kab/kota Provinsi Papua Barat;
3. Terwujudnya 90 unit Sarana Hunian Pendukung KSPN;
4. Terlaksananya 82 unit Rumah Khusus;
5. Terlaksananya 152 unit Rumah Susun
6. Terlaksananya 50 unit bantuan PSU bagi rumah MBR

Capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II juga digambarkan dalam antusias stakeholder serta masyarakat penerima bantuan dalam mendukung pembangunan perumahan menjadi hasil nyata dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

**Tabel 4.2.a Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II TA 2021**

NO	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi	Kinerja
						(Rp Ribu)	
<b>1</b>	<b>IA</b>	<b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>				<b>1.542.958</b>	<b>100</b>
1	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni				1.542.958	100
1	ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1.195.401	100
2	FAD		Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan	1 Layanan	123.286	100
3	FBA		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	13 Daerah (Prov/Kab/Kota)	13 Daerah (Prov/Kab/Kota)	224.270	100
<b>2</b>	<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>				<b>2.434.463</b>	<b>100</b>
2	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan				2.434.463	100
4	EAA		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1.635.620	100
5	EAC		Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	699.618	100
6	EAD		Layanan Sarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	99.225	100
<b>TOTAL</b>						<b>3.977.421</b>	

**Tabel 4.2.b. Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II TA 2021**

NO	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi	Kinerja
						(Rp Ribu)	
<b>1</b>	<b>IA</b>	<b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>				<b>196.971.740</b>	<b>86,04</b>
1	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni				196.971.740	86,04
1	ABF		Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	394.441	100
2	CBB		Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	64 Unit	64 Unit	19.455.766	100
3	FAD		Perencanaan dan Penganggaran	4 Layanan	4 Layanan	248.413	100
4	FAG		Pengawasan Pembangunan	7 Laporan	7 Laporan	11.665.586	89,22

**LAPORAN KINERJA TA. 2021**  
**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN WILAYAH PAPUA II**

5	RBB		Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	2.830,01	2.830,01	165.207.534	84,12
2	WA	<b>Program Dukungan Manajemen</b>				<b>2.434.463</b>	<b>100</b>
2	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan				2.434.463	100
4	EAA		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1.561.621	100
5	EAC		Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	304.620	100
6	EAD		Layanan Sarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100.000	100
<b>TOTAL</b>						<b>198.937.981</b>	

#### 4.3. PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua Barat dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja. Berikut perbandingan capaian kinerja setiap tahun anggaran terhadap Renstra 2020-2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II.

**Tabel 4.3 Perbandingan Capaian Kinerja setiap Tahun Anggaran terhadap Renstra 2020-2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II**

No	Sasaran Kegiatan	Pencapaian Kinerja					Renstra				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	3	4	0	0	0	3	4	4	4	4
2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	5.510	2.520	0	0	0	5.510	3.000	4.500	4.700	5.000
3	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	74	82	0	0	0	74	111	250	300	350
4	Jumlah Rumah susun yang dibangun	0,002	4	0	0	0	2	5	6	6	5
5	Jumlah Bantuan Pengembangan sarana hunian pendukung KSPN	0	90	0	0	0	0	140	125	125	225
6	Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	0	50	0	0	0	0	300	400	500	600



#### **4.4. ANALISIS KINERJA ORGANISASI**

Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan Tahun Anggaran 2021 telah selesai dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Visi yang tertuang dalam laporan akhir kinerja pemerintah. Dalam menjalankan misi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II telah melaksanakan :

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan Perumahan sebanyak 4 dokumen
2. Jumlah Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya sebanyak 2.520 unit
3. Jumlah Sarana Hunian Pendukung KSPN sebanyak 90 unit
4. Pembangunan Rumah Susun sebanyak 152 Unit
5. Pembangunan Rumah Khusus sebanyak 82 Unit
6. Pembangunan 50 Unit bantuan PSU bagi rumah MBR

Permasalahan yang dialami oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua Barat yakni: Konflik sosial yang mempengaruhi jalannya proses pembangunan, kondisi geografis Papua Barat di lokasi pekerjaan yang pada dasarnya pegunungan serta kepulauan, kurangnya tenaga kerja terampil, ketersediaan material non lokal di lokasi pekerjaan, serta pembatasan PPKM yang dilaksanakan Pemerintah guna mengantisipasi penyebaran Virus Covid sehingga pada jadwal Monev dan kegiatan Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan oleh balai tidak sesuai waktu yang ditetapkan..

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II menindaklanjuti setiap permasalahan yang dihadapi di lokasi pekerjaan dengan berkoordinasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pelaksana, konsultan, dan stakeholder lainnya terkait kelancaran pembangunan perumahan di wilayah kerja masing-masing.

## 5.1. PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang terdapat di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua Barat tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

### **PPK. Perencanaan dan Pengendalian Satuan Kerja BP2P Papua II :**

1. Banyak usulan bantuan perumahan yang belum lengkap secara administrasi;
2. Terhambatnya kegiatan Sinkronisasi dan Pembinaan Pokja PKP yang diselenggarakan oleh Balai akibat dari adanya kegiatan PPKM yang tidak menentu serta surat edaran SEKJEN PUPR tentang Penyelenggaraan Perjalanan Dinas/Penugasan dan Kegiatan Tatap Muka terkait kasus positif covid-19 yang meningkat signifikan;
3. Kelengkapan data external oleh penerima bantuan yang belum maksimal, sedangkan yang sudah lengkap masih menunggu kelanjutan proses serah terima dan alih status di tingkat Pusat.

### **PPK. Rumah Swadaya dan PSU**

#### **Rumah Swadaya**

1. SK Penetapan Dirjen yang menjadi usulan KL sehingga perlu verifikasi ulang dan banyak terjadi penggantian penerima bantuan sehingga membutuhkan waktu untuk verifikasi yang lama.
2. Jumlah dampingan setiap TFL sangat banyak, serta jarak tiap kelurahan / desa yang berjauhan mengakibatkan TFL tidak maksimal dalam melaksanakan pendampingan di lapangan.
3. Usulan kementerian / lembaga belum mempertimbangkan kesesuaian antara lokasi anggaran dalam DIPA dengan kategori wilayah (pegunungan / pesisir/ daratan rendah dan perkotaan)
4. Pekerjaan konstruksi mengalami keterlambatan karena upah tukang di rasa kurang oleh tukang sehingga mempengaruhi intensitas pekerjaan dan lebih memilih pekerjaan di luar program BSPS.

#### **PSU**

1. Dalam persyaratan pencairan keuangan untuk PSU, harus di lengkapi dengan sertifikat Uji Kuat Lentur Beton sebagaimana yang telah di tentukan sesuai SK Dirjen Bina Marga, Hal ini sangat sulit dikarenakan terbatasnya Laboratorium yang memiliki Alat Uji Lentur tersebut di Manokwari.

### **PPK. KSPN**

1. Kondisi Sosial yang terkait dengan adat budaya masyarakat setempat yang harus di kondisikan serta posisi geografis ke lokasi penerima bantuan cukup sulit dijangkau untuk suplai material
2. Tenaga kerja kerja terlatih sulit di dapatkan untuk bekerja di lokasi-lokasi yang telah di sepakati.

**PPK. Rumah Khusus :**

- 1) Terjadi pergeseran lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dilapangan oleh pihak Pemerintah Daerah setempat karena lokasi pekerjaan yang direncanakan tidak siap bangun;
- 2) Faktor cuaca curah hujan tinggi sehingga akses ke lokasi menjadi sulit untuk di tempuh tetap
- 3) Terhambatnya akses kelokasi pekerjaan karena jalan yang belum ada pengerasan sehingga ter hambat penyedia jasa dalam memobilisasi material dari dan menuju lokasi pekerjaan;

**5.2. LANGKAH KE DEPAN**

Sementara langkah kedepan yang dilakukan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Pendampingan yang intens kepada pengusul terkait administrasi usulan pada Aplikasi SIBARU;
2. Kkoordinasi yang instens pada Direktorat SSPP terkait jadwal pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi dan Pembinaan Pokja PKP;
3. Koordinasi yang intens dengan penerima bantuan dan pengelola BMN Pusat
4. Melaksanakan pelelangan dini;
5. Perlu dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM bidang perumahan;
6. Penambahan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.
7. Penambahan biaya operasional TFL dalam DIPA Anggaran tahun berikutnya.
8. Biaya tukang untuk dimasukkan dalam sharing APBD kabupaten penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2022.

Demikian Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II Tahun 2020 ini disusun dan dapat memberikan informasi yang berguna dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengembangan kebijakan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan.

- PERJANJIAN KINERJA AWAL BP2P PAPUA II TAHUN 2021



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II  
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yance Fabisa**  
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Khalawi AH**  
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

**Pihak Kedua**



**Khalawi AH**  
NIP. 19631222 199003 1 004

**Pihak Pertama**



**Yance Fabisa**  
NIP. 19650412 199703 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		
SARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni	1 Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	2 Laporan
	2 Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	2.140 Unit
	3 Jumlah Bantuan Pengembangan Sarana Hunian Pendukung KSPN	140 Unit
	4 Jumlah Rumah Susun yang dibangun	196 Unit
	5 Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	- Tower
	6 Jumlah Rumah khusus yang dibangun	61 Unit
	7 Jumlah Rumah khusus yang dipelihara	- Unit
	8 Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	300 Unit
2 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2 Layanan
	2 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	2 Layanan
	3 Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan

Kegiatan:

1. Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman	Rp	199.095.004.000
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	Rp	4.263.763.000
	Total Rp	203.648.004.000

Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Perumahan



**Khalawi AH**  
NIP. 19631222 199003 1 004

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II



**Yance Fabisa**  
NIP. 19650412 199703 1 009

• PERJANJIAN KINERJA AKHIR BP2P PAPUA II TAHUN 2020

REVISI AKHIR



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II  
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yance Pabisa**  
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iwan Suprijanto**  
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2021

**Pihak Kedua**



**Iwan Suprijanto**  
NIP. 19710930 199803 1 001

**Pihak Pertama**



**Yance Pabisa**  
NIP. 19650412 199703 1 009

REVISI AKHIR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II  
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SABARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1 Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan	4 Laporan
	2 Jumlah Berita Simulasi Peningkatan Kualitas Rumah	2.520 Unit
	3 Jumlah Bantuan Pengembangan Sarana Hunian Pendukung KSPH	90 Unit
	4 Jumlah Rumah Susun yang dibesugun	152 Unit
	5 Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	- Tower
	6 Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	82 Unit
	7 Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Unit
	8 Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	50 Unit
2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1 Jumlah Layanan Servis dan Pemesanan Internal	2 Layanan
	2 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Staf	2 Layanan
	3 Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan

Kegiatan:

- Penyediaan Akses Perumahan Layak dan Aman
- Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan

Anggaran

Rp 198.615.345.000

Rp 4.433.626.000

**Total Rp 203.048.971.000**

Direktur Jenderal Perumahan



**Iwan Suprijanto**  
NIP. 19710930 199803 1 001

Jakarta, Desember 2021

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II



**Yance Pabisa**  
NIP. 19650412 199703 1 009

• **PERJANJIAN KINERJA AWAL SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA BARAT 2021**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI PAPUA BARAT  
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II  
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mickhael Nicolas Demena**  
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yance Fabisa**  
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

**Pihak Kedua**



**Yance Fabisa**  
NIP. 19650412 199703 1 009

**Pihak Pertama**



**Mickhael Nicolas Demena**  
NIP. 19800813 200312 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI PAPUA BARAT  
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II  
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni	1 Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan 2 Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya 3 Jumlah Bantuan Pengembangan Sarana Hunian Pendukung KSPN 4 Jumlah Rumah Susun yang dibangun 5 Jumlah Rumah Susun yang dipelihara 6 Jumlah Rumah khusus yang dibangun 7 Jumlah Rumah khusus yang dipelihara 8 Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	1 Rekomendasi Kebijakan 2.140 Unit 140 Unit 196 Unit - Tower 61 Unit - Unit 300 Unit
2 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker 3 Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan

Kegiatan:	Anggaran
1. Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman	Rp 196.945.004.000
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	Rp 2.100.000.000
	<b>Total Rp 199.045.004.000</b>

Kepala Balai Pelaksana  
Penyediaan Perumahan Papua II



**Yance Fabisa**  
NIP. 19650412 199703 1 009

Jakarta, Januari 2021

Kepala Satuan Kerja  
Penyediaan Perumahan  
Provinsi Papua Barat



**Mickhael Nicolas Demena**  
NIP. 19800813 200312 1 004

• PERJANJIAN KINERJA AKHIR SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA BARAT 2021

**REVISI AKHIR**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI PAPUA BARAT  
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II  
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mickhael Nicolas Demena**  
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yance Pabisa**  
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua**



**Yance Pabisa**  
NIP. 19650412 199703 1 009

Jakarta, Desember 2021

**Pihak Pertama**



**Mickhael Nicolas Demena**  
NIP. 19800813 200312 1 004

**REVISI AKHIR**


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI PAPUA BARAT  
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II  
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	1 Laporan
	2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	2.520 Unit
	3. Jumlah Bantuan Pengembangan Sarana Hunian Pendukung KSPW	90 Unit
	4. Jumlah Rumah Susun yang ditangan	152 Unit
	5. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	- Tower
	6. Jumlah Rumah khusus yang dipelihara	82 Unit
	7. Jumlah Rumah khusus yang dipelihara	- Unit
	8. Jumlah Rumah MSK yang mendapat fasilitas layanan	50 Unit
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariat Direktorat Jenderal Perumahan	1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
	2. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Staf/ke	1 Layanan
	3. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan:


1. Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman	Rp	Anggaran 198.971.740.000
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	Rp	1.966.241.000
	<b>Total Rp</b>	<b>198.937.981.000</b>

Kepala Balai Pelaksana  
Penyediaan Perumahan Papua II



**Yance Pabisa**  
NIP. 19650412 199703 1 009

Kepala Satuan Kerja  
Penyediaan Perumahan  
Provinsi Papua Barat



**Mickhael Nicolas Demena**  
NIP. 19800813 200312 1 004

• **SP DIPA REGULER BP2P PAPUA II TA 2021**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Pelikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420161/2021**



---

**A. Dasar Hukum:**  
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
 3. UU No. 9 Tahun 2000 tentang APBN TA 2001

**B. Dengan ini dibagikan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (003)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAYAT	
2. Unit Organisasi	: (01)	Ditjen Perumahan	
3. Poskod	: (03)	PAPUA BARAT	
4. Kode Nama Subter	: (K02101)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II	
Selancar	: Rp.	4.800.000.000	( EMPAT MILIAR ENAM RATUS JUTA RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:  
 Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :  
 Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir**  
**Terlampir**

Jumlah Uang

<b>C. Sumber Dana berasal dari :</b>			
1. Rangkap Murni	Rp.	4.800.000.000	4. Projeksi/Hibah Dalam Negeri
2. PNBP			- Projeksi Dalam Negeri
PNBP TA Bejalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri
3. Projeksi/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung
- Projeksi Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung
4. Pemakaian dana dibelikan melalui :			6. SBSP PDS
1. KPN MANKOWAR	(003) Rp.	4.800.000.000	

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer):**

1. DIPA Pelikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Pelikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Pelikan berlaku sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sesuai dan pemisahan dana/penggunaan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Perkiraan Dana dan Perkiraan Penyerapan yang tercantum dalam Halaman II DIPA, diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Pelikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Pelikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Pelikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020  
A/N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

/s/  
AGUSLANE  
NIP. 196805111902021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2021**



Selancar	: (K02101) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II	
06	PERUMAHAN DAN PASLITAS UMUM	Rp. 4.800.000.000
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Rp. 2.400.000.000
06.90	PERUMAHAN DAN PASLITAS UMUM LAINNYA	Rp. 2.150.000.000



• **SP DIPA REVISI I BP2P PAPUA II TA 2021**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



03-0110-5411-9933-1000

**NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420161/2021**

**Revisi ke 01**

Tanggal : 17 Februari 2021

**A. Dasar Hukum:**

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. UU No. 9 Tahun 2000 tentang APBN TA 2001

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	: (07)	Dijen Perumahan
3. Prostrat	: (03)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II
4. Kode Nama Saklar	: (420161)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II
Sebesar	: Rp.	4.170.685.000 ( EMPAT MILIAR SERATUS TUJUH PULUH JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan/kegiatan sebagai berikut:

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir**

Jumlah Uang

**Terlampir**

**C. Sumber Dana Bersifat Dari :**

1. Supiah Mula	Rp.	4.170.685.000	4. Program/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Program Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Lepasung	Rp.	0
3. Program/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Program Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBDN PDS	Rp.	0

**D. Pencatatan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN MANOKWARI (065) Rp. 4.170.685.000

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer):**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan saklar dan pencatatan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penerimaan Penarikan yang tercantum dalam Halaman II DIPA di atas sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang tercantum di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang valid).
7. DIPA Petikan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 20 November 2020  
A/N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

/s/  
ASRI CLAN  
NIP. 19650811190221001

**LAMPIRAN**

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2021**



03-0110-5411-9933-1000

Saklar : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

05	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	4.170.685.000
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Rp.	2.359.143.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	1.811.542.000

• **SP DIPA REVISI I POK I BP2P PAPUA II TA 2021**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Pelikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI/AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420101/2021**



**Revisi ke 02**  
Tanggal : 23 Maret 2021

**A. Dasar Hukum:**

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 9 Tahun 2001 tentang APBN TA 2001

**B. Dengan ini dibagikan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	
2. Unit Organisasi	: (07)	Diğer Perumahan	
3. Prokrak	: (03)	PAPUA BARAT	
4. Kode/Nama Sektor	: (402101)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II	
5. Subsektor	: Rp.	4.170.000.000	( EMPAT MILIAR SERATUS TUJUH PULUH JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH )

**Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:**

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

**Terlampir**

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir**

Jumlah Uang

**C. Sumber Dana berasal dari :**

1. Sisa/ah Murni	Rp.	4.170.000.000	4. Projeaan/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. RNP			- Projeaan Dalam Negeri	Rp.	0
RNP TA Bejalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Projeaan/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Projeaan Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBDN PDS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN : MANOKWARA (06) Rp: 4.170.000.000

**E. Penyediaan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Pelikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Pelikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengisian berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Pelikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sektor dan pencairan dan pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Perkiraan Dana dan Perkiraan Penarikan yang tercantum dalam Halaman III DIPA di atas sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Pelikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Pelikan dengan database RKA-KU DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KU DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan buku induk yang asli).
7. DIPA Pelikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

/s/  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 19661201991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI/AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**NOMOR : DIPA- 033.07.1.420101/2021**



Sektor : (402101) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

00	PERUMAHAN DAN PRASALTA UMUM	Rp.	4.170.000.000
0601	PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Rp.	2.359.143.000
0690	PERUMAHAN DAN PRASALTA UMUM LAINNYA	Rp.	1.811.542.000

● **SP DIPA REVISI I POK II BP2P PAPUA II TA 2021**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420161/2021**



**Revisi ke 03**  
Tanggal : 13 April 2021

**A. Dasar Hukum:**

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	: (07)	Ditjen Perumahan
3. Provinsi	: (33)	PAPUA BARAT
4. Kode Nama Satker	: (420161)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II
Sebesar	: Rp. 4.170.685.000	( EMPAT MILIAR SERATUS TUJUH PULUH JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir**

**Terlampir**

Jumlah Uang

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rujiah Murni	Rp.	4.170.685.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN MANOKWARI	(000) Rp.	4.170.685.000
-------------------	-----------	---------------

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang terutang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukt-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196012301981021001

**LAMPIRAN**

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2021**



Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

00	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	4.170.685.000
06.01	PERMANSIUNAN PERUMAHAN	Rp.	2.359.143.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	1.811.542.000

• **SP DIPA REVISI II BP2P PAPUA II TA 2021**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420161/2021**



05:7775-0410-2162-3917

**A. Dasar Hukum:**

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

**Revisi ke 04**

Tanggal : 08 Juli 2021

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	: (07)	Ditjen Perumahan
3. Provinsi	: (33)	PAPUA BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (420101)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II
Sebesar	: Rp.	4.126.927.000 ( EMPAT MILIAR SERATUS DUA PULUH ENAM JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH TUJUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :  
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir**

**Terlampir**

Jumlah Uang

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	4.126.927.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :			6. SBSN PBS	Rp.	0
1. KPPN MANOKWARI	(005) Rp.	4.126.927.000			

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penilaian Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 190612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2021**



05:7775-0410-2162-3917

Satker : (420101) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

00	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	4.126.927.000
00.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Rp.	2.315.385.000
00.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	1.811.542.000

**LAPORAN KINERJA TA. 2021**  
**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II**

• **SP DIPA REVISI III BP2P PAPUA II TA 2021**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420161/2021**



**Revisi ke 05**  
**Tanggal : 30 Agustus 2021**

**A. Dasar Hukum:**

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(07)	Ditjen Perumahan
3. Provinsi	:	(33)	PAPUA BARAT
4. Kode>Nama Satker	:	(420161)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II
Sebesar	:	Rp.	3.958.990.000 ( TIGA MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir**

Jumlah Uang

**Terlampir**

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	3.958.990.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPKN MANOKWARI (005) Rp. 3.958.990.000

**E. Pernyataan Syarat dan Kelentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA disisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

/s/  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
**NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2021**



Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

00	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	3.958.990.000
00.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Rp.	2.315.385.000
00.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	1.643.605.000

• **SP DIPA REVISI IV BP2P PAPUA II TA 2021**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420161/2021**



**Revisi ke 06**  
Tanggal : 22 Oktober 2021

**A. Dasar Hukum:**

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	: (07)	Ditjen Perumahan
3. Provinsi	: (33)	PAPUA BARAT
4. Kode/Nama Sather	: (420101)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II
Sebesar	: Rp.	4.110.990.000 ( EMPAT MILIAR SERATUS SEPUHLUH JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir**

Jumlah Uang

**Terlampir**

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	4.110.990.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencatran dana dilakukan melalui :**

1. KPPN MANOKWARI	(005) Rp.	4.110.990.000
-------------------	-----------	---------------

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencatran dana-pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196012301991021001

**LAMPIRAN**

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021  
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2021**



Sather : (420101) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

00	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	4.110.990.000
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Rp.	2.467.385.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	1.643.605.000

• **SP DIPA REVISI IV POK I BP2P PAPUA II TA 2021**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**



05.2004-1906-0510-3104

**NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420161/2021**

**Revisi ke 07**

Tanggal : 26 November 2021

**A. Dasar Hukum:**

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	: (07)	Ditjen Perumahan
3. Provinsi	: (33)	PAPUA BARAT
4. Kode/Nama Satker	: (420161)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II
Sebesar	: Rp.	4.110.990.000 ( EMPAT MILIAR SERATUS SEPULUH JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir**

Jumlah Uang

**Terlampir**

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	4.110.990.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN MANOKWARI (005) Rp. 4.110.990.000

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penilaian Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

/s/  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

**LAMPIRAN**

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2021**



05.2004-1906-0510-3104

Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

00	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	4.110.990.000
00.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Rp.	2.407.385.000
00.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	1.643.605.000

• SP DIPA REVISI IV POK II BP2P PAPUA II TA 2021

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Pelikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**  
NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420161/2021

Revisi ke 08  
Tanggal : 03 Desember 2021

A. Dasar Hukum:  
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  
3. UU No. 9 Tahun 2000 tentang APBN TA 2001

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:  
1. Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
2. Unit Organisasi : (07) Dijen Perumahan  
3. Divisi : (03) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II  
4. Kode Nama Salinan : (40161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II  
Sebesar : Rp. 4.110.990.000 ( EMPAT MILIAR SERATUS SEPULUH JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan/kegiatan sebagai berikut:  
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :  
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

**Terlampir**  
**Terlampir**  
Jumlah Uang

C. Sumber Dana Bersifat Dari :

1. Sisa/ah Murni	Rp.	4.110.990.000	4. Program/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. DIPA	Rp.	0	- Program Dalam Negeri	Rp.	0
DIPA TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Program/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Program Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :			8. SISKOP	Rp.	0
1. KPPN MANOKWARI	(083) Rp.	4.110.990.000			

E. Pernyataan Syah dan Keterbacaan (Ditandatangani)  
1. DIPA Pelikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).  
2. DIPA Pelikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode anggaran berupa digital sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (tanda tangan).  
3. DIPA Pelikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan salinan dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.  
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.  
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Pelikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.  
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Pelikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).  
7. DIPA Pelikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 23 November 2020  
A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

isa  
ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196912011991021001

**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**  
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2021

Salinan : (40161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II			
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	4.110.990.000	
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Rp.	2.467.385.000	
06.02 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	1.643.605.000	